KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Sisdiknas, anggaran pendidikan mesti lebih rinci lagi
Tanggal : Minggu, 09 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Sisdiknas

Anggaran Pendidikan Mesti Lebih Rinci Lagi

FOTO TEDY RH

Reni Astuti

ANGGOTA Komisi X DPR Reni Astuti berharap RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memperjelas penggunaan *mandatory spending* 20 persen anggaran pendidikan. Hal ini agar dana besar yang digelontorkan negara benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Reni menilai, penggunaan anggaran pendidikan selama ini belum memiliki arah dan indikator hasil yang terukur. "Sudah 20 persen dijalankan tiap tahun, tapi belum ada kejelasan digunakan untuk apa saja. Apakah untuk beasiswa, tunjangan guru, atau peningkatan sarana pendidikan," ucapnya di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menyebut, RUU Sisdiknas akan mengatur rinci dana pendidikan itu agar tidak hanya terserap di pusat, tapi juga menjangkau sekolah di daerah terpencil. Pemerataan akses dan mutu harus menjadi dasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Pasalnya, saat ini masih banyak daerah yang tertinggal dari sisi infrastruktur, fasilitas belajar, dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, arah belanja pendidikan perlu berpihak pada pemerataan kualitas, bukan sekadar peningkatan angka serapan.

"Kalau tidak ada kejelasan arah kebijakan, *mandatory spending* hanya jadi angka di atas kertas. Padahal yang dibutuhkan masyarakat itu hasil nyata," ujar politikus PKS itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menambahkan, klausul mandatory spending dalam RUU Sisdiknas harus dirumuskan secara tegas. Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir di masa mendatang.

"Harus tertulis jelas dalam UU agar tidak ada celah penyimpangan penafsiran. Kejelasan ini juga penting untuk menjamin peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan," ujarnya.

Dia bilang, regulasi pendidikan ke depan harus adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Pendidikan tidak boleh lagi dikelola hanya berdasarkan rutinitas administratif. "Harus berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat," tegas Legislator Fraksi PKB itu.

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menambahkan, implementasi *mandatory spending* untuk pendidikan merupakan amanat UUD 1945. Aturan turunan RUU Sisdiknas harus memastikan anggaran tersebut berdampak nyata pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk di jenjang perguruan tinggi.

"Dana pendidikan harus dirasakan dari PAUD sampai perguruan tinggi, bukan hanya untuk wilayah atau institusi tertentu," ujarnya.

Hetifah berharap, masukan dari masyarakat bisa memperkaya substansi RUU Sisdiknas, agar lebih berpihak pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Setiap pandangan yang masuk harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata. ■ PYB